

## **EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KEMANDIRIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU AGAM**

**Nova Marlianti<sup>1</sup>, Diga Putri Oktaviane<sup>2</sup>, Wahib Assyahri<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

[ovhalouche@gmail.com](mailto:ovhalouche@gmail.com)<sup>1</sup>, [lingga091086@gmail.com](mailto:lingga091086@gmail.com)<sup>2</sup>, [wassyahri.wa@gmail.com](mailto:wassyahri.wa@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*Poverty is a condition in which individuals are unable to meet their basic needs, affecting social, psychological, and economic aspects while hindering community self-reliance. The Family Hope Program (PKH) is designed as an initial step to build a sustainable social protection system to break the cycle of poverty. This study aims to evaluate the implementation of PKH in promoting the independence of beneficiary families (KPM) in Nagari Pakan Sinayan, Agam Regency. A descriptive qualitative approach with a goal-oriented evaluation model by William N. Dunn was applied. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving KPM, PKH facilitators, and local government officials. The findings indicate that PKH successfully achieved its short-term objectives by improving access to education and healthcare services. However, most beneficiaries remain dependent on social assistance due to low economic literacy and limited productive business guidance. Therefore, a policy reorientation focusing on economic empowerment is required to foster sustainable independence.*

**Keywords:** Family Hope Program (PKH), Beneficiary Empowerment, Program Evaluation, Social Protection.

### **Abstrak**

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, yang berdampak pada aspek sosial, psikologis, dan ekonomi serta menghambat kemandirian masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang sebagai langkah membangun sistem perlindungan sosial berkelanjutan untuk memutus rantai kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan PKH terhadap kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Nagari Pakan Sinayan, Kabupaten Agam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan model evaluasi berorientasi tujuan menurut William N. Dunn. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi kepada KPM, pendamping PKH, dan aparat nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH berhasil meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai tujuan jangka pendek. Namun sebagian besar KPM masih bergantung pada bantuan karena rendahnya literasi ekonomi dan minimnya pembinaan usaha produktif. Hal ini menunjukkan perlunya reorientasi PKH agar lebih menekankan pemberdayaan ekonomi sebagai dasar tercapainya kemandirian.

**Kata Kunci :** Program Keluarga Harapan (PKH), Kemandirian KPM, Evaluasi Program, Kemiskinan.

## **I. PENDAHULUAN**

Kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi standar hidup minimum yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. (Faturachman, 2005) menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kondisi ini juga mencakup keterbatasan akses terhadap layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan yang berdampak pada cara berpikir masyarakat serta menghambat kemandirian.

Kemiskinan berdampak pada persoalan sosial seperti rendahnya pendidikan, kesehatan yang buruk, hingga meningkatnya kriminalitas. Soekanto dalam (Nabila Popy & Andriyus, 2024) menyebutkan kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu mempertahankan kehidupannya sesuai standar sosialnya. BPS mendefinisikan seseorang sebagai miskin jika tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar yang diukur berdasarkan pengeluaran bulanan di bawah Garis Kemiskinan (Kemensos, 2021).

Berbagai strategi pengentasan kemiskinan dilakukan melalui peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan bantuan sosial. Namun bantuan sosial bersifat konsumtif sehingga tidak menyelesaikan kemiskinan secara menyeluruh. Diperlukan program yang membangun kapasitas manusia agar masyarakat mampu keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri.

Kondisi kemiskinan berhubungan erat dengan kesehatan dan pendidikan. Rendahnya pendidikan membatasi peluang kerja, sedangkan kondisi kesehatan yang buruk menghambat produktivitas. Akibatnya, keluarga miskin kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai kebijakan, salah satunya PKH yang diluncurkan tahun 2007. Dasar hukum PKH antara lain Keputusan Menko Kesra No.31/KEP/MENKO-KESRA/IX/2007 dan Permensos No.1 Tahun 2018. Tujuannya membantu rumah tangga sangat miskin menjaga daya beli dan membangun sistem perlindungan sosial berkelanjutan.

Penerima manfaat PKH disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam jangka pendek, PKH mengurangi beban ekonomi, sedangkan dalam jangka panjang diharapkan memutus siklus kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan pendidikan dan kesehatan anak-anak.

Program ini mensyaratkan KPM memenuhi komitmen tertentu seperti kehadiran anak di sekolah, pemeriksaan kesehatan, dan mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Persyaratan ini bertujuan menumbuhkan perilaku mandiri dan meningkatkan kualitas hidup.

Menurut UU No.11 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah dan masyarakat. Urgensi pelayanan publik terletak pada peran strategisnya sebagai inisiatif pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi kunci untuk menjamin pemerintahan yang efektif serta responsif terhadap dinamika aspirasi publik yang kian kompleks (Adventy, 2024). PKH terbukti membantu keluarga sangat miskin meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan pendidikan dan kesehatan (Domri D, Ridwan R, & Jaya Mulia, 2019).

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah menggunakan program strategis seperti Program PKH sebagai instrumen perlindungan sosial berbasis bantuan bersyarat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. PKH memerlukan evaluasi karena tidak hanya menasar bantuan tunai, tetapi juga perubahan perilaku dan peningkatan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui intervensi seperti P2K2 dan pendampingan sosial.

Hal ini relevan dengan pandangan (Dunn, 2003) bahwa kebijakan publik harus dinilai dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatannya. Menurut Ralph W. Tyler dalam model Goal-Oriented Evaluation, keberhasilan program dinilai dari pencapaiannya terhadap tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini, PKH tidak hanya dilihat dari keberhasilan penyaluran bantuan, tetapi dari sejauh mana program mampu membentuk kemandirian ekonomi, sosial, dan psikologis KPM. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pelaksanaan, peran pendamping, dan keterlibatan aktif KPM dalam kegiatan pemberdayaan.

Di Nagari Pakan Sinayan, Kabupaten Agam, PKH telah berjalan sejak 2016 dan menasar keluarga miskin berdasarkan kriteria dari Keputusan Menteri Sosial RI No.262/HUK/2022. Data kemiskinan dihimpun melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbarui secara berkala. Namun, pelaksanaan PKH di lapangan masih menghadapi tantangan. (Utari et al., 2024) menjelaskan bahwa kemandirian mencakup kesadaran, kemampuan mengatasi hambatan, dan kapasitas diri. Sayangnya, jumlah KPM di Nagari Pakan Sinayan

terus meningkat dari 78 KPM tahun 2019 menjadi 204 KPM tahun 2025, menunjukkan bahwa efek pemberdayaan masih lemah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses sistematis yang bertujuan meningkatkan kekuatan dan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengendalikan kehidupannya secara mandiri (Suharto Edi, 2015). Konsep ini menekankan pentingnya peningkatan keterampilan, literasi ekonomi, dan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis partisipasi (Hasdiansyah, 2023). Pemberdayaan tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi mendorong masyarakat untuk berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Selain itu, sebagian KPM tidak aktif dalam kegiatan P2K2. Hasil wawancara dengan pendamping PKH menunjukkan bahwa beberapa penerima manfaat jarang hadir dalam pertemuan bulanan. Kurangnya partisipasi ini menghambat perubahan pola pikir dan kemandirian KPM.

Observasi terhadap wali jorong juga memperlihatkan rendahnya partisipasi sosial KPM dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong. Mereka cenderung hanya fokus pada penerimaan bantuan tanpa menjalankan tanggung jawab sosial. Masalah lain adalah sebagian KPM yang sudah menjadi peserta lebih dari enam tahun masih belum mampu mandiri secara ekonomi. Wawancara dengan beberapa mantan penerima menunjukkan bahwa mereka masih membutuhkan bantuan karena tingginya biaya hidup dan pendidikan anak.

Ditemukan pula ketidaktepatan sasaran penerima PKH. Beberapa KPM muda dengan kemampuan ekonomi cukup masih menerima bantuan akibat lambatnya pembaruan data di DTKS. Hal ini menunjukkan perlunya sistem validasi yang lebih efektif agar bantuan tepat sasaran.

Dari 204 KPM, hanya enam keluarga yang berhasil graduasi mandiri melalui usaha mikro seperti makanan dan pertanian. Ini menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian dan perlunya pendampingan usaha serta pelatihan keterampilan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi PKH di Nagari Pakan Sinayan penting untuk menilai efektivitasnya dalam membangun kemandirian KPM dan memperbaiki strategi pengentasan kemiskinan ke depan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena dinilai tepat untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman langsung dari subjek penelitian mengenai pelaksanaan PKH (Suharto, 2015). Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan relevansi mereka terhadap fokus penelitian (Turner, 2010).

Lokasi penelitian ditetapkan di Nagari Pakan Sinayan, Kabupaten Agam, dengan rentang waktu pelaksanaan Juni 2024 hingga Agustus 2025. Pemilihan rentang waktu lebih dari satu tahun didasarkan pada pandangan Rossi, Lipsey, & Freeman (2004) yang menyatakan bahwa evaluasi program memerlukan periode observasi yang cukup untuk melihat ketercapaian tujuan jangka pendek dan indikasi kemandirian awal penerima manfaat.

Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta diperkuat dengan data sekunder dari dokumen administrasi PKH di nagari. Untuk menjaga validitas, penelitian menerapkan uji keabsahan data melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas sebagaimana dikemukakan oleh (Marni Nining, et al., 2025). Analisis data dilakukan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (Rijali Ahmad, 2018) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berlapis dengan proses verifikasi berkelanjutan untuk menjaga objektivitas dan keandalan temuan penelitian.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada RTSM yang telah terdaftar dalam DTKS dan ditetapkan sebagai KPM. PKH di Nagari Pakan Sinayan telah berjalan secara rutin sejak tahun 2016, dengan mekanisme penyaluran dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui transfer langsung ke rekening KPM. Selama pelaksanaannya, para pengelola program menghadapi berbagai tantangan khususnya dalam membentuk kemandirian KPM agar tidak tergantung pada bantuan dan diharapkan dapat merubah pola pikir KPM dalam mensejahterakan keluarga. Meskipun telah berjalan selama beberapa tahun program PKH masih menyisakan sejumlah kekurangan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi terkait program PKH dalam membentuk kemandirian KPM di nagari Pakan Sinayan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang relevan.

Informan terdiri dari pihak pelaksana PKH, KPM, serta aparatur pemerintahan nagari Pakan Sinayan. Untuk pelaksana PKH terdiri dari Pendamping PKH Kecamatan Banuhampu

yaitu ibu IR yang diwawancarai pada tanggal 1 Agustus 2025 sebagai informan kunci, kemudian Wali Nagari Pakan Sinayan yang diwawancarai pada tanggal 5 Agustus 2025, selanjutnya Sekretaris Nagari ibu RN, Kasi Pelayanan ibu NV dan Kasi Pemerintahan bapak F diwawancarai pada tanggal 13 Agustus 2025. Peneliti juga mewawancarai ketua Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari bapak FDL yang diwawancarai pada tanggal 14 Agustus 2025. Kemudian peneliti mewawancarai 2 orang wali jorong setempat KDJ dan TBL yang diwawancarai pada tanggal 15 Agustus 2025 dimana mereka adalah sebagai informan pendukung dalam penelitian ini. Untuk KPM sebagai informan utama peneliti mewawancarai 6 orang terdiri dari ibu Wisraniati (48 Th), Riri (35 Th), ibu Elmizar (56 Th) diwawancarai pada tanggal 13 Agustus 2025 di kantor Walinagari, kemudian ibu Rini (45 Th), ibu Afni (45Th) dan ibu Sri (40Th) diwawancarai pada tanggal 15 Agustus 2025 pada saat pertemuan P2K2 di Jorong Tobo Ladang.

### **1. Evaluasi Program PKH dalam Mendorong Kemandirian KPM di Nagari Pakan Sinayan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PKH di Nagari Pakan Sinayan memberikan dampak signifikan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin, terutama pada sektor pendidikan dan konsumsi rumah tangga. Mengacu pada model evaluasi berorientasi tujuan menurut Dunn (2003), aspek efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana program mendekati tujuan peningkatan kesejahteraan dasar keluarga. Data lapangan mengindikasikan bahwa bantuan tunai sebagian besar digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak seperti seragam, buku, dan perlengkapan sekolah, serta pemenuhan kebutuhan dapur sehari-hari.

Meskipun demikian, penggunaan bantuan masih bersifat konsumtif dan belum diarahkan pada kegiatan produktif yang dapat menciptakan kemandirian ekonomi. Informasi dari beberapa penerima menunjukkan bahwa nominal bantuan yang diterima setiap tiga bulan dirasakan belum cukup untuk dijadikan modal usaha. Kondisi ini mencerminkan bahwa tujuan jangka pendek program telah tercapai, tetapi tujuan jangka panjang berupa kemandirian ekonomi masih jauh dari harapan. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas program berada pada level pemenuhan kebutuhan dasar, bukan pembentukan kemandirian.

Pada indikator efisiensi, penyaluran bantuan PKH di Nagari Pakan Sinayan berjalan relatif lancar tanpa hambatan yang berarti. Prosedur pencairan melalui bank atau PT POS dinilai mudah oleh penerima manfaat. Namun aspek efisiensi administrasi masih dipengaruhi

oleh validitas data KPM. Ketika data kependudukan belum diperbarui, proses pencairan dapat mengalami keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi program sangat bergantung pada sinkronisasi data antara pemerintah nagari dan sistem administrasi pusat.

Secara teknis, penyaluran bantuan telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah, dan tidak ditemukan kasus pemotongan bantuan di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi alokasi sumber daya, program telah dilaksanakan dengan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, efisiensi belum diikuti oleh inovasi pendampingan yang mampu mendorong KPM memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

Jika ditinjau dari aspek kecukupan, sebagian besar keluarga penerima menyatakan bahwa bantuan PKH sangat membantu dalam mengurangi tekanan ekonomi, terutama saat menghadapi kebutuhan besar seperti tahun ajaran baru atau kenaikan harga bahan pokok. Meski demikian, bantuan tersebut hanya mencukupi untuk jangka waktu 1–2 minggu setelah pencairan, sehingga untuk periode berikutnya mereka kembali bergantung pada pendapatan utama keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan PKH lebih berfungsi sebagai penyangga konsumsi, bukan alat transformasi ekonomi keluarga.

Sebagian penerima bahkan memanfaatkan bantuan yang diterima sebagai jaminan pembayaran hutang kepada pemberi pinjaman informal seperti bank keliling. Fenomena ini menunjukkan bahwa kendati PKH membantu meringankan beban, tingkat kecukupannya belum mampu menghentikan siklus kerentanan ekonomi. Tanpa intervensi pelatihan atau akses modal produktif, bantuan cenderung habis untuk konsumsi dan tidak membangun kapasitas ekonomi keluarga.

Pada indikator pemerataan, Program PKH telah menjangkau seluruh KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan pencairan bantuan dilakukan secara seragam sesuai jadwal nasional. Namun masalah muncul pada pembaruan data, di mana keluarga yang sudah tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan karena proses validasi dan penghapusan data membutuhkan waktu yang panjang. Sebaliknya, keluarga yang seharusnya layak masuk daftar penerima harus menunggu tahap verifikasi administratif.

Kondisi tersebut menyebabkan munculnya persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat, meskipun secara teknis distribusi bantuan telah mengikuti regulasi. Ini menunjukkan bahwa pemerataan secara administratif telah tercapai, namun pemerataan dalam

arti substantif (ketepatan sasaran) masih menghadapi kendala struktural dalam sistem data nasional.

Pada aspek responsivitas, pendamping PKH di Nagari Pakan Sinayan dinilai cukup cepat merespons masalah teknis yang dihadapi KPM, terutama terkait pencairan dan penyesuaian data keluarga. Komunikasi yang dilakukan melalui pertemuan P2K2 dan koordinasi informal dinilai membantu KPM memahami mekanisme program. Namun, pendamping tidak memiliki kewenangan penuh dalam mempercepat kebijakan perubahan data atau pemberian akses program tambahan, sehingga tidak semua keluhan dapat diselesaikan secara langsung.

Meskipun responsivitas pendamping cukup baik, masih terdapat kesenjangan pemahaman antara pelaksana program dan aparat nagari. Pemerintah lokal menilai koordinasi lintas aktor perlu diperkuat agar PKH tidak hanya berjalan sebagai skema bantuan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nagari. Dengan demikian, responsivitas tidak hanya diukur dari kecepatan merespons keluhan, tetapi juga dari kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal.

Pada indikator ketepatan, sebagian besar KPM menyatakan bahwa bantuan PKH tepat sasaran karena mereka merasa termasuk dalam kategori keluarga kurang mampu. Namun aparat nagari menilai ketepatan tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial yang dinamis di lapangan. Terdapat kasus di mana anak dari KPM yang telah membentuk rumah tangga baru tetap menerima bantuan meskipun kondisinya sudah lebih baik daripada orang tuanya.

Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran masih perlu diperbaiki melalui mekanisme verifikasi berbasis komunitas atau pelibatan tokoh lokal yang memahami kondisi sosial warga. Tanpa penyempurnaan pada aspek ini, program berpotensi menciptakan ketergantungan dan memperluas daftar penerima tanpa menghasilkan perubahan signifikan terhadap kemandirian keluarga.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi berdasarkan indikator Dunn (2003) menunjukkan bahwa Program PKH di Nagari Pakan Sinayan efektif dalam meringankan beban ekonomi jangka pendek dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Namun, tujuan strategis berupa kemandirian ekonomi keluarga penerima belum tercapai secara optimal. Ketergantungan terhadap bantuan masih tinggi, sementara kapasitas produktif keluarga belum berkembang karena keterbatasan akses modal, pendampingan usaha, dan literasi ekonomi.

## **2. Faktor Yang Menjadi Penghambat Program PKH dalam Membentuk Kemandirian KPM di Nagari Pakan Sinayan**

Meskipun Program PKH di Nagari Pakan Sinayan telah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar kepada KPM, dalam praktiknya terdapat sejumlah faktor yang menjadi penghambat bagi tercapainya kemandirian ekonomi KPM. Wali Nagari menyampaikan diantara faktor-faktor penghambat program tersebut dalam membentuk kemandirian KPM antara lain:

- a. Ketergantungan pada Bantuan Sebagian besar KPM masih menempatkan bantuan PKH sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini menimbulkan sikap ketergantungan sehingga motivasi untuk mencari alternatif usaha mandiri menjadi rendah.
- b. Keterbatasan Keterampilan dan Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan kerja KPM menjadi hambatan dalam mengakses peluang usaha produktif. Banyak KPM yang belum memiliki kemampuan teknis maupun manajerial untuk mengembangkan usaha secara mandiri.
- c. Minimnya Akses Modal Usaha PKH lebih bersifat sebagai bantuan konsumtif, bukan modal produktif. Ketiadaan akses terhadap lembaga keuangan, koperasi, atau program pemberdayaan ekonomi lainnya membuat KPM kesulitan memulai usaha yang berkelanjutan.
- d. Keterbatasan Wewenang Pendamping Peran pendamping lebih pada pengawasan dan pelaporan, bukan pada pengambilan keputusan. Hal ini membatasi ruang gerak pendamping dalam menindaklanjuti keluhan dan memberikan solusi langsung bagi pengembangan kemandirian KPM.
- e. Kurangnya Program Pendukung Pemberdayaan PKH di Nagari Pakan Sinayan belum sepenuhnya terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya. Akibatnya, KPM hanya menerima bantuan tanpa disertai pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, maupun akses pasar yang dapat menunjang kemandirian.

## **3. Upaya peningkatan efektivitas penyaluran PKH di Nagari Pakan Sinayan**

Dalam pelaksanaan Program PKH di Nagari Pakan Sinayan, efektivitas penyaluran bantuan merupakan aspek penting agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Pertama, peningkatan validasi dan pembaruan data penerima manfaat menjadi hal yang penting. Kasi Pelayanan Nagari, ibu Nv (42 tahun), menyampaikan bahwa pembaruan data

harus dilakukan secara berkala dan konsisten. Ia menekankan bahwa tanpa pembaruan, bantuan akan berpotensi menimbulkan ketimpangan bagi penerimanya. Selain itu, pembaruan data juga penting untuk memastikan bahwa penerima yang sudah tidak layak tidak tetap terdaftar dan keluarga baru yang memenuhi syarat dapat segera masuk dalam daftar penerima.

Pembaruan data secara berkala dan konsisten merupakan faktor krusial dalam menjaga ketepatan sasaran Program PKH. Tanpa adanya mekanisme validasi yang rutin, bantuan berpotensi tidak tepat sasaran karena masih disalurkan kepada keluarga yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria, sementara keluarga baru yang lebih membutuhkan justru tertunda memperoleh haknya. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan dalam distribusi bantuan, tetapi juga dapat memicu kecemburuan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan data menjadi langkah strategis untuk memastikan bantuan benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Kedua, penguatan koordinasi antara pendamping PKH, pemerintah nagari, dan Disdukcapil agar setiap permasalahan terkait data, pencairan, maupun keluhan masyarakat dapat segera diatasi.

Selain itu, perluasan kegiatan pemberdayaan ekonomi juga menjadi upaya penting agar bantuan PKH tidak hanya berfungsi sebagai penunjang kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong KPM menuju kemandirian. Program pendampingan seperti pelatihan keterampilan, fasilitasi UMKM lokal, dan akses permodalan dapat membantu KPM untuk tidak hanya bergantung pada bantuan tunai. Hasil penelitian relevan dari (Suharto, 2019) dan (Kurniawati, 2021) menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan sosial meningkat secara signifikan apabila dibarengi dengan intervensi pemberdayaan yang terintegrasi dengan potensi lokal masyarakat.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH di Nagari Pakan Sinayan telah membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama pendidikan anak dan konsumsi rumah tangga. Bantuan yang diterima setiap tiga bulan sekali dirasakan bermanfaat dalam meringankan beban pengeluaran, meskipun jumlahnya relatif kecil. Namun, dari sisi kemandirian ekonomi, sebagian besar KPM belum menunjukkan perubahan signifikan karena bantuan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif, bukan untuk usaha produktif yang mendorong graduasi mandiri. Berdasarkan wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa dari sisi efektivitas, PKH belum sepenuhnya meningkatkan pendapatan

maupun kesejahteraan keluarga penerima, sehingga tujuan jangka panjang menciptakan keluarga mandiri belum tercapai secara optimal. Mayoritas KPM masih bergantung pada bantuan dan belum memiliki sumber penghasilan alternatif yang stabil (Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018; Ny, 42 th).

Meskipun demikian, keberadaan PKH sangat dirasakan dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan rumah tangga, perlengkapan sekolah anak, dan biaya kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa PKH berperan sebagai penopang keberlangsungan hidup keluarga prasejahtera, meskipun belum berdampak signifikan terhadap peningkatan taraf ekonomi mereka. Temuan ini sejalan dengan peraturan yang menyebutkan bahwa PKH bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Namun, sebagian KPM masih bergantung pada bantuan, dan beberapa menyatakan kesulitan jika bantuan dihentikan karena belum memiliki usaha produktif (Suharto, 2010).

Dari sisi efisiensi, mekanisme pencairan bantuan PKH di Nagari Pakan Sinayan berjalan sesuai ketentuan, dilakukan tiap tiga bulan, dan jumlah nominal sesuai komponen keluarga seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, atau lansia. Proses penyaluran sudah tepat waktu, transparan, dan mengikuti prosedur, selama data KPM valid dan diperbarui secara berkala. Namun, permasalahan utama muncul dari validitas dan pembaruan data di Disdukcapil, misalnya perubahan status keluarga atau anggota baru, yang dapat menimbulkan keterlambatan pencairan atau potensi terhentinya bantuan. Hal ini sejalan dengan (Hidayati, 2020) dan Kementerian Sosial (2021) yang menekankan pentingnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk keberhasilan penyaluran bantuan.

Aspek kecukupan menunjukkan bahwa bantuan PKH meringankan beban ekonomi, tetapi jumlahnya relatif terbatas sehingga belum mendorong perubahan ekonomi signifikan. Bantuan lebih berfungsi sebagai penopang sementara, sementara sebagian besar KPM masih bergantung pada bantuan karena belum memiliki akses pelatihan keterampilan, modal usaha, atau program pemberdayaan ekonomi lain. Temuan ini sesuai dengan penelitian (Sari, 2019) dan (Pratama, 2021), yang menyatakan bahwa kemandirian KPM hanya tercapai apabila bantuan sosial diintegrasikan dengan program pemberdayaan yang meningkatkan kapasitas dan produktivitas ekonomi. Fenomena tambahan seperti hutang pada bank keliling menunjukkan bahwa kecukupan bantuan belum menutup kebutuhan KPM secara menyeluruh.

Dalam hal pemerataan, meskipun distribusi bantuan dilakukan merata kepada KPM yang tercatat, ketepatan sasaran masih menghadapi hambatan akibat validasi dan pembaruan data yang lambat. Beberapa keluarga yang tidak lagi miskin tetap menerima bantuan, sementara keluarga baru yang layak belum terakomodasi. Temuan ini sejalan dengan (Hastuti et al., 2020) yang menekankan kesalahan inklusi dan eksklusi akibat keterlambatan pembaruan DTKS. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan formal sudah baik, tetapi akurasi sasaran masih menjadi tantangan.

Responsifitas program juga mengalami keterbatasan. Pendamping PKH berperan dalam sosialisasi dan pemahaman prosedur, namun koordinasi dengan pemerintah nagari dan instansi terkait masih kurang optimal. Hal ini menyebabkan keluhan masyarakat terkait data dan teknis pencairan membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Sejalan dengan (Suharto, 2019), efektivitas bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pendamping, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dari sisi ketepatan, mayoritas penerima sudah sesuai kriteria, namun keluhan tetap muncul terkait penerima yang dianggap tidak layak. Proses validasi perubahan data di tingkat kabupaten hingga pusat memakan waktu lama sehingga usulan tidak segera terealisasi. Faktor penghambat kemandirian KPM antara lain rendahnya keterampilan dan literasi ekonomi, jumlah bantuan yang terbatas, tingginya kebutuhan hidup, masalah data yang belum diperbarui, dan hutang pada bank keliling. Secara sosial, PKH berhasil meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan dan kesadaran kesehatan, namun sebagian besar KPM masih bergantung pada bantuan dan cenderung pasif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Upaya peningkatan efektivitas PKH meliputi penguatan kapasitas KPM melalui pemberdayaan ekonomi, sinergi dengan program pemerintah lain, peningkatan peran pendamping PKH sebagai fasilitator pemberdayaan, penguatan literasi keuangan, monitoring partisipatif, dan membangun kesadaran kemandirian KPM. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan, tetapi juga oleh manajemen bantuan, integrasi program lain, dan pemberdayaan keluarga penerima manfaat (Dunn, 2003). Dengan sinergi tersebut, PKH dapat berfungsi tidak hanya sebagai penopang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sebagai jalan menuju kemandirian dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan goal oriented evaluation menurut teori Dunn, dapat disimpulkan bahwa PKH di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam telah berjalan cukup baik dalam memenuhi tujuan jangka pendek, yakni membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM) serta meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Namun, capaian tersebut masih lebih menekankan pada aspek perlindungan sosial dibandingkan pada upaya pemberdayaan menuju kemandirian. Sebagian KPM telah merasakan manfaat nyata berupa keberlanjutan pendidikan anak dan peningkatan kesehatan keluarga, tetapi masih banyak yang belum mampu menunjukkan perubahan signifikan dalam hal kemandirian ekonomi.

Hal ini mengindikasikan bahwa program cenderung menimbulkan ketergantungan, meskipun terdapat sebagian kecil KPM yang berhasil menuju tahap graduasi mandiri. Dari sisi implementasi, penyaluran bantuan dinilai efektif dan tepat sasaran, tetapi pendampingan serta kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif belum optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKH di Nagari Pakan Sinayan telah berkontribusi positif dalam aspek perlindungan sosial, namun tujuan jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian KPM masih belum tercapai secara maksimal dan memerlukan penguatan pada aspek pemberdayaan serta keberlanjutan program.

##### **Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pakan Sinayan disarankan agar tidak hanya berorientasi pada aspek penyaluran bantuan, tetapi juga diperkuat melalui pemberdayaan ekonomi demi mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendamping PKH diharapkan meningkatkan intensitas pembinaan, motivasi, serta fasilitasi akses terhadap pelatihan keterampilan dan program usaha produktif. Selain itu, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait perlu menyediakan dukungan akses permodalan, pendampingan usaha, serta kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal. Strategi komunikasi juga harus dioptimalkan untuk menanamkan kesadaran bahwa tujuan akhir PKH adalah tercapainya graduasi mandiri. Melalui integrasi langkah-langkah tersebut, PKH diharapkan mampu bertransformasi dari sekadar perlindungan sosial jangka pendek menjadi instrumen pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adventy, M. I. Y., Tarizah, D. A., Adellah, & Rafinzar, R. (2024). Tren Penelitian Pada Kualitas Layanan Publik Di Dunia: Bibliometric Analysis. *JURNAL BORNEO AKCAYA*, 10(1), 111–121.
- Domri D, Ridwan R, and Jaya Mulia. 2019. 1 Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN *Evektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abstrak Informasi Artikel*.
- Faturachman, F., & Molo, M. 2005. *Pengantar Ilmu Sosial*.
- Hasdiansyah. 2023. *Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat*. Eureka Media Aksara, Oktober 2023 Anggota Ikapi Jawa Tengah No. 225/JTE/2021 .
- Kemensos. 2021. “Pedoman Umum PKH.”
- Marni Nining, Wahidin, and Linggua Sanjaya Usop. 2025. “Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Manjawet Uwei Di Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3(4): 5107–13. doi:10.31004/jerkin.v3i4.1176.
- Muryadi, Agustanico Dwi. 2017. “Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi (Agustanico Dwi Muryadi) Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi.” 3(1).
- Nabila Popy, and Andriyus. 2024. “Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Kabupaten Kampar.” *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan* 1 Nomor 4.
- Rijali Ahmad. 2018. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah* 17: 81–95.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A systematic approach* (7th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Suharto Direktur Kesejahteraan Sosial Anak, Edi, and Kementerian Sosial Dosen luar biasa di Jurusan Kesejahteraan Sosial. 2015. 17 22 Sosiohumaniora *Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan*.
- Turner, D. W., III. (2010). *Qualitative Interview Design: A Practical Guide for Novice Investigators. The Qualitative Report*, 15(3), 754-760.
- Utari, Sri, Haryani Saptaningtyas, and Joko Winarno. 2024. “Strategi Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus Pemberdayaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Sidorejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro ).” *Action Research Literate* 8(3). <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl>.

Warman, Warman, Laili Komariyah, and Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum. 2023. "Konsep Umum Evaluasi Kebijakan." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan* 3: 25–32. doi:10.30872/jimpian.v3ise.2912